

PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI DIY TAHUN 2010-2016

THE EFFECT OF PAD, DAU AND DAK TO CAPITAL EXPENDITURES IN DIY 2010-2016

Oleh: **Lailatul Mubasiroh**

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

lailatulmubasiroh@gmail.com

Moh. Djazari, M. Pd.

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK secara sendiri-sendiri dan bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi DIY. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai $r_{x1y} = 0,739$, $r^2_{x1y} = 0,546$ dan $t_{hitung} 6,302 > t_{tabel} 2,040$. 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan DAU terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai $r_{x2y} = 0,806$, $r^2_{x2y} = 0,650$ dan $t_{hitung} 7,824 > t_{tabel} 2,040$. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan DAK terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai $r_{x3y} = 0,427$, $r^2_{x3y} = 0,182$ dan $t_{hitung} 2,720 > t_{tabel} 2,040$. 4) Terdapat pengaruh positif PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai $R_{y(1,2,3)} = 0,882$, $R^2_{y(1,2,3)} = 0,779$ dan nilai $F_{hitung} 36,368 > F_{tabel} 2,92$.

Kata kunci: PAD, DAU, DAK, Belanja Modal.

Abstract

This research is to know the effect of PAD, DAU, DAK partially and simultaneously to Capital Expenditures in DIY Province. It employs documentation method. The research instrument are single and multiple regressions. The result showed that: 1) There is positive and significant effect of PAD to Capital Expenditures based on the $r_{x1y} = 0,739$, $r^2_{x1y} = 0,546$ and $t_{arithmetic} 6,302 > t_{table} 2,040$. 2) There is positive and significant effect of DAU to Capital Expenditures based on the $r_{x2y} = 0,806$, $r^2_{x2y} = 0,650$ and $t_{arithmetic} 7,824 > t_{table} 2,040$. 3) There is positive and significant effect of DAK to Capital Expenditures based on the $r_{x3y} = 0,427$, $r^2_{x3y} = 0,182$ and $t_{arithmetic} 2,720 > t_{table} 2,040$. 4) There is positive and significant effect of PAD, DAU, DAK simultaneously to Capital Expenditures based on the $R_{y(1,2,3)} = 0,882$, $R^2_{y(1,2,3)} = 0,779$ and $F_{arithmetic} 36,368 > F_{table} 2,92$.

Keywords: PAD, DAU, DAK, Capital Expenditures.

PENDAHULUAN

Belanja Modal menurut PP No. 58 Tahun 2005 merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Belanja Modal merupakan komponen Belanja Langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap yang dalam pemanfaatan aset tetap tersebut ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan ada yang tidak dimanfaatkan langsung oleh publik. Pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik diantaranya adalah jalan raya, jembatan, trotoar, rambu lalu lintas, dan stadion atau gedung olahraga. Pemanfaatan aset yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik atau tidak dimanfaatkan langsung oleh publik yaitu seperti gedung kantor pemerintahan.

Sejalan dengan pembaharuan peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan

diamandemennya Kepmendagri No. 29 Tahun 2005 menjadi Permendagri No. 13 Tahun 2006, pengalokasian sumber daya ke dalam Belanja Modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ulum (2008: 251) menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa Belanja Modal dipengaruhi berbagai faktor diantaranya adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum, 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Bagi Hasil (DBH), dan 5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang berasal dari daerah sebagai modal utama untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dan merupakan cermin kemandirian bagi suatu daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah (Kuncoro, 2014: 7). Besarnya persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah menunjukkan sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Sumbangan realisasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 mencapai 38,87% dari total pendapatan daerah. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi PAD Pemerintah Daerah di Provinsi DIY Tahun 2013.

Pemerintah Daerah	Realisasi PAD (Jutaan Rupiah)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah.
D.I. Yogyakarta	1.004.063,12	38,87	40,01
Kab. Kulonprogo	95.991,51	9,57	9,95
Kab. Bantul	224.197,86	14,75	16,16
Kab. Gunung Kidul	83.427,45	6,72	7,07
Kab. Sleman	449.270,30	23,65	26,53
Kota Yogyakarta	383.052,14	29,25	31,07

Sumber: Statistik Keuangan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014: 10.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada tiga kabupaten/kota yang sumbangan Pendapatan Asli Daerahnya di atas 10%, yaitu Kabupaten Bantul sebesar 14,75%, Kabupaten Sleman sebesar 23,65%, dan Kota Yogyakarta sebesar 29,25%. Besarnya sumbangan PAD untuk Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul masih di bawah 10%. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus-menerus dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan anggaran untuk Belanja Modal sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum menurut Halim (2008: 160) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Alokasi Umum di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi DAU) Pemerintah Daerah di Provinsi DIY Tahun 2013.

Pemerintah Daerah	Realisasi DAU (Jutaan Rupiah)	Persentase DAU terhadap Pendapatan Daerah	Persentase DAU terhadap Belanja Daerah
D.I. Yogyakarta	757.056,70	29,31	30,17
Kab. Kulonprogo	594.978,79	59,31	61,68
Kab. Bantul	854.810,63	56,23	61,60
Kab. Gunung Kidul	779.069,24	62,72	66,01
Kab. Sleman	891.589,91	46,94	52,65
Kota Yogyakarta	597.212,21	45,60	48,44

Sumber: Statistik Keuangan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014: 14.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari kelima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah tergolong masih tinggi dikarenakan masih ada tiga kabupaten yang tingkat penerimaan Dana Alokasi Umum-nya di atas 50%, yaitu Kabupaten Kulonprogo sebesar 59,31%, Kabupaten Bantul sebesar 56,23%, dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 62,72%. Semakin besar penerimaan Dana Alokasi Umum yang merupakan sumber pendapatan daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta. Namun, dengan semakin besarnya persentase Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat tinggi. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk daerah khusus terpilih untuk tujuan nasional, yaitu: 1) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil dan tidak memiliki akses memadai ke daerah lain, 2) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi, 3) kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai, dan 4) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan (Kuncoro, 2014: 70). Dana bagi hasil merupakan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah (UU/33/2004).

Belanja Modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan

pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Hal ini berarti bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam kategori Belanja Modal haruslah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah masing-masing daerah. Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah agar persentase Belanja Modal terus ditingkatkan mulai dari 24%, kemudian 26-27% hingga pada tahun 2014 menjadi 30% (Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2013). Oleh karena itu pemerintah daerah harus menggunakan sumber-sumber pendapatan daerah untuk digunakan dalam hal pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah ke dalam Belanja Modal. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal di Provinsi DIY Tahun 2010-2016”**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *ex post facto*. Penelitian *ex post facto* adalah penelitian yang

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui data untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menemukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti (Alhamda, 2016: 5).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini dilakukan antara bulan Oktober 2017.

Target/Subjek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu: 1) Kabupaten Sleman, 2) Kabupaten Bantul, 3) Kabupaten Kulonprogo, 4) Kabupaten Gunung Kidul dan 5) Kota Yogyakarta.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan

Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota dan

Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 sampai dengan 2016. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan cara mencari, mengolah dan mencatat data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan berganda dengan uji prasyarat analisis yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

(1) Uji Asumsi Klasik

(a) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Menurut Nugroho (2005: 58), jika nilai koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,70 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari 0,70

maka dikatakan terjadi multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah persamaan yang tidak terjadi masalah multikolinearitas

(b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau gambaran hubungan antara yang diprediksi dengan *Studentized Delete residual* (Nugroho, 2005: 62).

Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dikatakan terjadi masalah heteroskedastisitas.

(c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji

apakah nilai variabel independen tidak mempunyai hubungan dengan variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Pengujian menggunakan uji *Run Test* dikatakan tidak terdapat masalah autokorelasi jika nilai *asympt sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, sedangkan jika nilai *asympt.sig* lebih kecil dari 0,05, maka terdapat masalah autokorelasi (Ghozali, 2012: 120).

(2) Uji Hipotesis

(a) Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen (Pendapatan Asli Daerah/ Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus) dengan satu variabel dependen (Belanja Modal). Persamaan dari regresi linear sederhana adalah $Y = a + bX$, di mana Y merupakan variabel dependen (Belanja Modal),

a merupakan konstanta, b merupakan koefisien regresi dan X merupakan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah/Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus).

(b) Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara beberapa (lebih dari satu) variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dengan satu variabel dependen (Belanja Modal).

Persamaan yang digunakan adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

, di mana Y adalah Belanja Modal, a adalah konstanta, b_1 adalah koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah, b_2 adalah koefisien regresi Dana Alokasi Umum, b_3 adalah koefisien regresi Dana Alokasi Khusus, X_1 adalah Pendapatan Asli Daerah, X_2 adalah Dana

Alokasi Umum dan X_3 adalah dana Alokasi Khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menggunakan koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Dana Alokasi Umum (X_2)	Dana Alokasi Khusus (X_3)
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	1	0,564	0,164
Dana Alokasi Umum (X_2)	0,564	1	0,472
Dana Alokasi Khusus (X_3)	0,164	0,472	1

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, besarnya koefisien korelasi antara variabel independen secara keseluruhan lebih kecil dari 0,70 sehingga dapat dikatakan bahwa antar variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terbebas dari gejala multikolinearitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Rank Spearman* adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji

Heteroskedastisitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
PAD	<i>Correlation Coefficient</i>	-0,092
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,601
DAU	<i>Correlation Coefficient</i>	-0,032
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,857
DAK	<i>Correlation Coefficient</i>	0,154
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,378

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, nilai *sig. (2-tailed)* Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,601, Dana Alokasi Umum sebesar 0,857, Dana Alokasi Khusus sebesar 0,378. Nilai *sig. (2-tailed)* antara variabel independen secara keseluruhan lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

c) Uji autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *Run Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value^a</i>	-2.190.174,94894
<i>Cases < Test Value</i>	17
<i>Cases >= Test Value</i>	18
<i>Total Cases</i>	35
<i>Number of Runs</i>	20
<i>Z</i>	0,348
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,728
<i>a. Median</i>	

Sumber: Data Selunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 5 di atas, diperoleh hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,728, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis

- a) Analisis Regresi Linear Sederhana
- (1) Uji Hipotesis Pertama

Hasil analisis regresi linear sederhana PAD terhadap Belanja Modal adalah:

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Sederhana PAD terhadap Belanja Modal

Variabel	PAD
Dependen	
Konstanta	83.622.288,473
Koefisien Regresi	0,367
r_{x1y}	0,739
r^2_{x1y}	0,546
T	6,302

Sig.	0,000
Keterangan	Positif-signifikan

Sumber: Data Sekunder

Diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 83.622.288,473 + 0,367X_1$. Nilai konstanta sebesar 83.622.288,473 menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (X_1) = 0 maka besarnya nilai Belanja Modal adalah = nilai konstanta. Nilai koefisien regresi 0,367 menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (X_1) meningkat sebesar 1% maka Belanja Modal meningkat sebesar 36,7%. Nilai koefisien determinasi (r^2_{x1y}) sebesar 0,546, koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,739 dan t_{hitung} 6,302 > t_{tabel} 2,040 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi (r^2_{x1y}) sebesar 0,546 menunjukkan besarnya pengaruh

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah sebesar 54,6%, sedangkan 45,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar persamaan regresi. Berdasarkan penjelasan hasil uji hipotesis pertama tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

(2) Uji Hipotesis Kedua

Hasil analisis regresi linear sederhana Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Regresi Linear Sederhana DAU terhadap Belanja Modal

Variabel	DAU
Dependen	
Konstanta	106.174.150,496
Koefisien Regresi	0,405
r_{x2y}	0,806
r^2_{x2y}	0,650
T	7,824
Sig.	0,000
Keterangan	Positif-signifikan

Sumber: Data Sekunder

Diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang di peroleh adalah $Y = 106.174.150,49 + 0,405X_2$. Nilai konstanta sebesar 106.174.150,49 menyatakan bahwa jika Dana Alokasi Umum (X_2) = 0 maka besarnya nilai Belanja Modal adalah = konstanta. Nilai koefisien regresi 0,405 berarti bahwa jika Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1% maka Belanja Modal meningkat sebesar 40,5%. Nilai koefisien determinasi (r^2_{x2y}) sebesar 0,650, koefisien korelasi sebesar (r_{x2y}) sebesar 0,806 dan t_{hitung} 7,824 > t_{tabel} 2,040 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi (r^2_{x2y}) sebesar 0,650 berarti bahwa besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah sebesar 65%, sedangkan 35% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar persamaan regresi. Berdasarkan penjelasan hasil uji hipotesis kedua tersebut,

maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

(3) Uji Hipotesis Ketiga

Hasil analisis regresi linear sederhana Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Sederhana DAK terhadap Belanja Modal

Variabel	DAK
Dependen	
Konstanta	134.901.677,986
Koefisien Regresi	0,655
r_{x_3y}	0,427
$r^2_{x_3y}$	0,182
T	2,710
Sig.	0,011
Keterangan	Positif-signifikan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel tersebut persamaan regresi yang di peroleh adalah $Y = 134.902.677,986 + 0,655X_3$. Nilai konstanta sebesar 134.902.677,986 menyatakan bahwa jika Dana Alokasi Khusus (X_3) = 0 maka besarnya nilai Belanja Modal adalah = konstanta. Nilai koefisien regresi 0,655 berarti bahwa jika Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1%

maka Belanja Modal meningkat sebesar 65,5%. Nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,182, koefisien korelasi (r_{x_3y}) sebesar 0,427 dan t_{hitung} 2,710 > t_{tabel} 2,040 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,182 berarti bahwa besarnya pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal adalah sebesar 18,2%, sedangkan 82,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar persamaan regresi. Berdasarkan penjelasan hasil uji hipotesis ketiga tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

b) Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal

Variabel Dependen	PAD	DAU	DAK
Konstanta	-68.134.988,924		
Koefisien Regresi	0,216	0,254	0,178
$R_{y(1,2,3)}$	0,882		
$R^2_{y(1,2,3)}$	0,779		
F	36,368		
Sig.	0,000		
Keterangan	Positif-signifikan		

Sumber: Data Sekunder
Diolah, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan regresi yang di peroleh adalah $Y = -68.134.988.924 + 0,216X_1 + 0,254X_2 + 0,178X_3$. Nilai konstanta sebesar -68.134.988,924 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) atau variabel independen = 0 maka besarnya nilai Belanja Modal adalah sama dengan konstanta. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,216 berarti bahwa jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1% maka Belanja Modal meningkat sebesar 21,6%. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,254 berarti jika Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1% maka Belanja Modal meningkat sebesar 25,4%. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus

sebesar 0,178 berarti jika Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1% maka Belanja Modal meningkat sebesar 17,8%. Nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,779, koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,882 dan F_{hitung} 36,368 > F_{tabel} 2,82 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,779 berarti bahwa besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal adalah sebesar 77,9% sedangkan 22,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar persamaan regresi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli

Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016, ditunjukkan dengan nilai r_{x1y} sebesar 0,739, nilai r^2_{x1y} sebesar 0,546, dan nilai t_{hitung} 6,302 > t_{tabel} 2,040.

- b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016, ditunjukkan dengan nilai r_{x2y} sebesar 0,806, nilai r^2_{x2y} sebesar 0,650 dan nilai t_{hitung} 7,824 > t_{tabel} 2,040.
- c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016, ditunjukkan dengan nilai r_{x3y} sebesar 0,427, nilai r^2_{x3y} sebesar 0,182 dan nilai t_{hitung} 2,710 > t_{tabel} 2,040.
- d. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016, ditunjukkan dengan nilai $R_{y(1,2,3)}$ sebesar 0,882, nilai $R^2_{y(1,2,3)}$ sebesar 0,779 dan nilai F_{hitung} 36,368 > F_{tabel} 2,92.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dari tahun ke tahun dan alokasi Belanja Modal juga semakin meningkat serta tercipta kemadirian daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengelola dengan baik Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat agar lebih mengutamakan pengalokasian ke Belanja Modal.
- b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang digunakan dalam penelitian agar lebih lengkap dan bervariasi. Variabel yang

digunakan dapat menggunakan sektor keuangan seperti Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi ataupun sektor non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan kondisi mikro ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2004). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali". *Jurnal Ekonomi*, 13 (2): 90-109.
- Alhamda, S. (2016). *Buku Ajar Metlit dan Statistik*. CV Budi Utama: 2016.
- Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing Public Expenditure: A Reference for Transition Countries*. Paris: SIGMA-OECD. <http://www.oecd.org/sigmawe>.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Ditjen Bina Keuangan Daerah. (2013). "Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen". *Artikel*. <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen> (diakses tanggal 26 Juli 2017, pukul 20.21)
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto & Wijayanti, S. (2015). *Statistik Keuangan Daerah: Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014*. Yogyakarta: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, B.A. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Andi: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Ulum MD, I. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM PRESS.